Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - LKE KEMENPANRB

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
21	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1.17	1.17	.Terdapat target Kegiatan Utama yang belum didasarkan pada baseline tahun sebelumnya.Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.Terdapat Sasaran Kegiatan Utama yang belum dikawal dengan Rencana Aksi secara relevan.Masih terdapat Indikator Output atas Rencana Aksi yang belum cukup menggambarkan Sasaran.Terdapat target Sasaran Kegiatan Utama yang belum dikawal dalam target Output Rencana Aksi.Penganggaran atas Rencana Aksi berpotensi tidak efisien	.Menetapkan target atas Kegiatan Utama berdasarkan kondisi capaian tahun-tahun sebelumnya.Menetapkan keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama.Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran.Melakukan reviu agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama.Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi
22	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	65	1.77		
23	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	2	1.2		Segera melakukan penetapan pengaturan mengenai sistem kerja pasca dilakukan penyederhanaan birokrasi
24	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	4	3.37	2.7	1. Menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat; 2. Meningkatkan pengendalian korupsi dengan: a. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan antikorupsi dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi,	1. Menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat; 2. Meningkatkan pengendalian korupsi dengan: a. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
Q.E.	DD Comoral	Canaian	Tingkot	3.5	0.5	0.5	yakni cegah, deteksi, dan respons; b. Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan; c. Menyusun laporan kinerja satuan tugas antigratifikasi; d. Menyusun pedoman reviu manajemen risiko. 3. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk: a. Menyusun rencana sosialisasi tentang stunting dengan lokus seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara; b. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. 4. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki pengelolaan sistem informasi pariwisata sehingga data yang disajikan akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh wisatawan; 5. Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah Kutai Kartanegara untuk: a. Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang; b. Melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.	antikorupsi dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons; b. Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan; c. Menyusun laporan kinerja satuan tugas antigratifikasi; d. Menyusun pedoman reviu manajemen risiko. 3. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk: a. Menyusun rencana sosialisasi tentang stunting dengan lokus seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara; b. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. 4. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki pengelolaan sistem informasi pariwisata sehingga data yang disajikan akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh wisatawan; 5. Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah Kutai Kartanegara untuk: a. Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang; b. Melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.
25	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3.3	0.5	0.5		

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
		Reformasi Birokrasi						
26	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	4	65.93	2.64	Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP dapat diakses pada esr.menpan.go.id dengan menggunakan akun instansi	
27	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	80.19	2	Penjelasan catatan tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah provinsi	Penjelasan rekomendasi tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah provinsi
28	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2.5	3	1.5	0	0
29	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	0	0	Tidak berpartisipasi dalam pengukuran nasional IKK.	Berpartisipasi dalam pengukuran nasional IKK yang diselenggarakan oleh LAN.
30	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	2.5	87.86	2.2	Kategori A (sangat baik)	Diperhatikan kekurangan nilai pada masing-masing variabel
31	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	2.5	2.31	1.16	•Penerapan aspek Metadata Statistik, Interoperabilitas Data dan Kode Referensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencapai predikat Baik (level 3) karena memenuhi bukti dukung dengan menyertakan dokumen pendukung seperti Screenshot SDSN yang sudah terbit di aplikasi INDAH serta dokumen kebijakan/peraturan/ketetapan tentang SDSN seperti Perban No 4 tahun 2020 Petunjuk Teknis Standar Data Statistik, PERGUB 48 SDI Prinsip Satu Data Indonesia Standar Data Statistik	•Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu untuk meningkatkan Indikator Perencanaan Statistik (Indikator 50301) untuk dapat mencapai tingkat kematangan terkelola. •Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu untuk menyediakan dokumen-dokumen untuk memenuhi tingkat kematangan 3, diantaranya Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) dan/atau Peta Jabatan yang memuat

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
							2021, Perpres SDI Prinsip Satu Data Indonesia Standar Data Statistik Nomor 39 Tahun 2019, Perban No 4 Tahun 2021 Standar Data Statistik Nasional. Sudah terdapat dokumen kebijakan berupa surat edaran, peraturan dan notulen rapat. •Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mencapai predikat baik. Sudah ada dokumen kebijakan berupa Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pemanfaatan Data Statistik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Didukung juga oleh Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 83 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang dilengkapi oleh Surat Edaran nomor B-2/Diskominfo/500.14/06/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kutai Kartanegara •Pada Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan terkait Perencanaan Pembangunan Statistik di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih mencapai predikat kurang. Hal ini disebabkan belum tersedianya dokumen penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia, hanya screenshoot website yang berisi rencana kerja Diskominfo •Pada Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel terkait Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih berada pada predikat cukup. Belum terdapat bukti dukung yang menunjukkan pemenuhan ABK Statistisi di keseluruhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih berada pada predikat cukup. Belum terdapat bukti dukung yang menunjukkan pemenuhan ABK Statistisi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih berada pada predikat kurang. Penilaian akurasi data hanya dilakukan pada sebagian kegiatan statistik yang dinilaikan.	perencanaan dan realisasi pemenuhan SDM bidang statistik di keseluruhan Pemerintah Daerah. Agar Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel terkait Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik menjadi lebih baik. •Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu untuk menunjukkan bukti dukung berupa dokumen yang menunjukkan pengelolaan/standardisasi cara pelaksanaan penilaian akurasi data di lingkungan Instansi Pusat atau Pemerintahan Daerah; dan Laporan/dokumen formal yang menunjukkan adanya pelaksanaan penilaian akurasi data pada masing-masing produsen data sesuai standar yang berlaku untuk mencapai predikat nilai baik pada Aspek Akurasi terkait Penilaian Akurasi Data. Hal ini merupakan implementasi dari pengelolaan/standardisasi yang ada. Oleh karena itu, laporan/dokumen formal dari masing-masing produsen data seharusnya konsisten (memenuhi standar yang sama) sehingga memungkinkan dilakukannya perbandingan antar produsen data.

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
32	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	76.57	1.91	1) Pengumuman RUP di atas 70%; 2) Realisasi e-Tendering di atas 70%; 3) Paket selesai katalog elektronik dari 50% sampai dengan 70%; 4) Terdapat transaksi Toko Daring; 5) Realisasi non e-Tendering/non e-Purchasing di atas 70%; 6) Pencatatan e-Kontrak di atas 70%; 7) Keterisian JF PPBJ masih di bawah 60%; 8) Level Kematangan sudah mencapai Level 3 (Proaktif).	1) Tingkatkan dan pertahankan kinerja pengumuman RUP SIRUP; 2) Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket tender; 3) Perlu ditingkatkan kinerja penyelesaiaan paket katalog elektronik; 4) Pertahankan kinerja realisasi toko daring; 5) Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket non-tender/non e-purchasing; 6) Tingkatkan dan pertahankan kinerja pencatatan e-kontrak;7) Segera memenuhi keterisian JF PPBJ melalui pengangkatan pertama, PPPK, dan/atau Perpindahan dari Jabatan Lain; 8) Implementasi dengan baik pencapaian tersebut. Selanjutnya persiapan menuju tingkatan berikutnya.
33	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	222	2.17	2024	
34	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	2	4.35	1.74		
35	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	94.46	1.89		Melaksanakan saran dalam surat ketua Ombudsman yang telah disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah
36	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	3.09	5.55	Predikat Baik	Rekomendasi terdapat dalam LHE masing-masing instansi
37	RB General	Capaian Sasaran	Capaian IKU Makro	4	91.63	3.67	Merupakan capaian IKU Makro yang terdiri dari Tingkat Penganggutan Terbuka, Indeks	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
		Strategis Reformasi Birokrasi					Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini	
38	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Non Makro	6	93.75	3.71	Jumlah IKU dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebanyak 16 indikator, sebanyak 15 IKU diantaranya capaiannya 90 % atau lebih, sedangkan sisanya IKU nomor 12 yang ada dalam Sasaran Strategis ke 9 capaiannya hanya sebesar 47,32 %.	Melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan terhadap seluruh target IKU yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja, sehingga apabila dijumpai capaian IKU secara berkala belum "on the track" segera dilakukan langkahlangkah antisipasi untuk meningkatkan capaian IKU tersebut pada triwulantriwulan berikutnya.
39	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	3	5	WTP	
40	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	85.57	3.42		
41	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	70.2	2.81	Kategori Cukup Sehat	Laporan lengkap dapat diunduh pada website evalbudker.menpan.go.id dengan username dan password yang sama sewaktu pengisian evaluasi budaya kerja
42	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	67.14	6.71	Internal: 70.8; Eksternal: 84.44; Eksper: 68.4	Setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2024. Dalam SPI 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat skor SPI sebesar 67.14. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kategori rentan yang

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
								berarti Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini TIDAK EFEKTIF.
43	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	88.7	7.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dihapus karena tidak memenuhi 9 unsur	Mendorong Pelaksanaan SKM Pada Seluruh UPP, Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
44	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1	0	0	(1) Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; (2) Tidak ditemukan rencana aksi reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.	(1) Menetapkan keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; (2) Memastikan tersedianya rencana aksi reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.
45	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0.22	0.22	(1) Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; (2) Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi; (3) Rencana aksi yang disusun belum menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan (masih cenderung business as usual); (4) Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder	(1) Menetapkan keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; (2) Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi; (3) Memastikan Rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual; (4) Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
							eksternal di luar pemerintahan	unsur pentahelix lain
46	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0.2	0.2	(1) Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; (2) Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait. (3) Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah; (4) Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi; (5) Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan.	(1) Menetapkan keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; (2) Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait; (3) Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah; (4) Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi; (5) Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain
47	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1	0.4	0.4		
48	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1	0	0	(1) Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; (2) Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait.; (3) Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi; (4) Rencana aksi yang disusun belum menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan (masih cenderung business as usual)	(1) Menetapkan keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; (2) Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait; (3) Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi; (4) Memastikan Rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
49	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	0	0	Tidak Menyusun Rencana Aksi RB Tematik Kemiskinan	
50	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	2.14	2.14	Data Realisasi Investasi yang digunakan Triwulan III 2023	
51	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	1.13	1.13	Menggunakan Data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Berdasarkan Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Nomor OT.04.03/A.IV/1483/2025 Tanggal 5 Februari 2025	
52	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2.94	2.94	Perhitungan Capaian Dampak PDN Mengacu pada KepmenPANRB 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2243	
53	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	0	0	Berdasarkan Penilaian Kinerja Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri dengan Menggunakan Data Tahun 2023 dan 2024, predikat penilaian kinerja pengendalian inflasi berada pada kriteria Belum Baik	
54	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2.5	1	0.5	Instansi sudah menyusun Arsitektur SPBE As-Is sesuai standar	Instansi perlu menyusun Arsitektur To- Be